

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pembatalan serta pemberhentian pejabat berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2023/PTUN-MDN, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberhentian Tergugat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Sumatera Utara terjadi karena adanya permasalahan tentang hasil evaluasi kinerja dan kedisiplinan Manajemen PNS. Maka pada tanggal 17 Mei 2023 tentang pemberhentian pejabat tergugat mengeluarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 100.3.3.1/2344/V/2023. Sehingga tergugat melakukan tindakan sewenang-wenang dengan kekuasaan dan kewenangan yang di milikinya. Bahwa keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut terdapat cacat administratif, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 118 ayat (2) mengatur: Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja Yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Karena tidak sesuai

dengan peraturan yang ada bahwa pemberhentian harus ada penyelidikan terlebih dahulu, akan tetapi didasarkan pada kesewenang-wenangan dari tergugat.

2. Pertimbangan hukum hakim terhadap Surat Keputusan Gubernur bahwa kedua objek sengketa dinyatakan batal, serta merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula atau dalam jabatan yang setara atau diberi kompensasi dalam bentuk lain, secara hukum dengan sendirinya tidak mempunyai dasar hukum yang sah.
3. Tentang pembatalan serta pemberhentian pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Utara oleh pejabat yang dikeluarkan surat keputusan oleh Gubernur Sumatera Utara, jika di pandang berdasarkan *siyasyah Idariyah* tidak sejalan atau tidak sesuai terhadap perkara ini. Dalam prinsip musyawarah karena bahwa memberhentikan pejabat dinas pekerjaan umum dan penata ruang provinsi Sumatera Utara tanpa melalui mekanisme penyelidikan terlebih dahulu. Prinsip keadilan karena pejabat dinas pekerjaan umum dan penata ruang provinsi Sumatera Utara merasa diperlakukan tidak adil oleh pejabat yang telah mengeluarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya secara sewenang-wenang, Adil berarti berpihak pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Maka keadilan yang sifat perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil.

B. Saran

1. Bagi Gubernur sebelum mengeluarkan surat keputusan sebaiknya melihat dalam aturan undang-undang dan aturan yang berlaku agar keputusan-keputusan tersebut berkaitan hukum.
2. Seharusnya sebagai pejabat dalam mengeluarkan surat keputusan harus sesuai juga dengan syari'at islam. Tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain dan tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal, 2012, *Hukum Kepegawaian Indonesia Rangkang education*, Yogyakarta: Pukap- Indonesia
- Ali, Muhammad Daud, 2013, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-19
- Ashiddiqi, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers
- At-Tawaniy, Abu Al-Qasim bin Muhammad bin, 1975, *Al-Is'aaf al-talab mukhtashar syarah al-manhaj al-muntakhab*, Al-Ahliyah, Cetakan 1
- Djazuli A, 2004, *Fiqh Siyasah Implemetasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana
- Djazuli, H.A, 2011, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Cetakan Ke- 4
- Diantha, I Made Pasek, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group
- E, Utrecht, 1957, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: NV Bali: Buku Indonesia
- HR, Ridwan, 2012, *Hukum Adminstrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hosen Ibrahim, 2003, *Fiqh Perbandingan (Masalah Perkawinan)*, Jakarta: Firdaus
- Haeli, 2018, *Bahan Ajar Manajemen ASN*, Nusa Tenggara Barat, Badan Penegmbangan Sumber Daya Manusia Daerah Nusa Tenggara Barat
- Hartini Sri, dkk, 2010, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- HR, Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press
- Hoesen, Koesoe Mahdtmadja Djenal, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bandung

- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Grafika
- Iqbal, Muhammad, 2014, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia
- Istiqbal, Nur, 2019, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Islam Dalam Islam*, Surabaya: Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
- Istianto Bambang, 2011, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Bogor: Mitra Wacana Media
- Jeje, Abdul Rojak, 2014, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: Unpress
- Kadarsiman Muh, 2018, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Depok: Rajagrafindo Persada
- Khalaf, Abdul Wahab, 1977, *Al-Siyasah Al-Syari'ah*, Kairo: Dar Al-Anshar
- Kadarisman, Mul, 2018, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Mahfud MD, SF. Marbun, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty
- Modul Pelatihan Dasar, 2017, *Manajemen Aparatur Sipil Negara, lembaga Administrasi Negara*
- Musbilan, Imam, 2011, *Qowaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Musanif, Rosdakarya, 2007, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung
- Makeling, Ni Putu Yai Laksmi dan 1 Ketut, 2018, *Penyelenggaraan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Program Kekhususan Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Udayana*
- Marbun, SF, 2003, *Peradilan Administrasi Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

- Matiman, Pradjohamidjojo, 200, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaa Negara*, Jakarta: Raja Ghalia Indonesia
- Nainggolan, 1983, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Gunung Agung
- Negara Kesinderan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Petter Mahmud, 2005, *Penelitian hukum edisi revisi*, kencana pernada media, Jakarta
- Pattipawae, Pezonda Rosiana, 2019, *Pelaksana EKsekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Pttimura
- Rahman, Asjumuni A, 2001, *Kaidah-Kaidah Fiqh "QowaidFiqhiyyah"*, Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan 1
- Roy, Muhammad, 2019, *Keadilan Dan Negara (Pemikiran Sayyid Quthbi Tentang Negara)*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press
- Rio, M. B. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. *Ejournal Cakrawala*, 5.
- Sachedina, Abdul Aziz A, 1991, *Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syi'ah*, Bandung: Mizan
- Salim, Abdul Muin, 1994, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo
- Sukardja, Ahmad, 1995, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta UI Press
- Syarifuddin, Amir, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Cetakan Ke-3
- SF, Marbun, 2013, *Hukum adminstrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta
- Soetami, 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Simbolon, Bob Humisor, 2022, *Pengujian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Juranl Dharmasisya
- Samin, Sariana Asri Dan Sabri, 2020, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Di Kec. Kajang, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah
- Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim And Muhammad Siddiq Armia. "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi" Jurnal Aphtn-Han 2 No. 1 (2023), 37-62.
- Srifariyati, Afsya Septa Nugraha, 2019, Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif Q.S An-Nisa ayat 58-59, Jurnal Muhammadiyah, Volume Nomor 1
- Taj, Abdurrahman, 1993, *Al- Siyasah Al- Syari'ah Wa Al-Fiqh Al Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar Al- Ta'lif
- Thoimah, Shobir, 2007, *Dirosatu Fi Nidhamih Islam*, Beirut Dar Al- ajil
- Tjandra, W Riwa, 2015, *Terori Dan Praktik Pengadilan Tatta Usaha Negara*, Yogyakarta: Atma Jaya Press
- W. Riawan, Tjandjara, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Wahyu Abdul, Jafa, 2018, *Fiqh Siyasah Dalam Persepektif Al-Quran dan Hadist*, Al-Imrah: Jurnal Penelitian Vol3, No. 1
- Widjaja, A.W, 2006, *Admintrasi Kepegawaian*, Jakrta: Rajawali
- Zana, Mujaar Ibnu Syarif dan Khamami, 2008, *Fiqh Dan Pemikiran Politik*, Jakarta: Erlanga
- Zainuddin, 2017, *Islam Dan Prinsip Pemerintahan Islam*, Malang: Skripsi Uin Maulana Malik Ibrahim